



RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU TAHUN 2020



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU
2018**

2020



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2020 telah dapat disusun sesuai dengan ketentuan.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau ini merupakan wujud nyata dari pelaksanaan Rencana Pembangunan yang berbasis Kinerja yang mengacu kepada RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dan RPJMD Provinsi Riau. Diharapkan nantinya Perubahan RENJA 2020 ini dapat menjadi dasar pelaksanaan kegiatan perubahan Tahun 2020 guna meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, sehingga Rencana Kerja (RENJA) perubahan ini menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam penyusunan rancangan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2018 ini.

Pekanbaru, Agustus 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU**

H.HELMI D, M.Pd

Pembina Utama Muda
NIP. 19661231 199703 1 027



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTARTABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	6
1.3 Maksud dan Tujuan	9
1.4 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018 Sampai dengan Triwulan II Tahun 2018	12
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA	
A. Kegiatan yang tidak mengalami perubahan	17
B. Kegiatan yang mengalami pergeseran/perubahan	17
C. Kegiatan yang tidak muncul/dihilangkan	17
BAB IV PENUTUP	19



BAB I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, bahwa sesuai Pasal (343) ayat (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. sehubungan dengan hal tersebut maka disusunlah Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan memperhatikan Perubahan RKPD Provinsi Riau Tahun 2020. Dengan adanya rasionalisasi dan perubahan Anggaran APBD Tahun 2020 yang mana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau mengalami pergeseran anggaran belanja sesuai dengan ekonomi daerah maka disusunlah Rencana Kerja Perubahan untuk tahun 2020.

Renja Perubahan 2020 dilakukan disebabkan karena Implikasi pandemi *Corona Virus Disease 2019 (covid-19)* yang telah memberi dampak terhadap perlambatan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan sehingga diperlukan upaya pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaringan pengaman sosial (social safety net), serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat terdampak. Hal tersebut akan



berdampak terhadap penerimaan Daerah Provinsi Riau melalui dana tranfer seperti DAU, DAK, DBH dan DID yang akan dilakukan penyesuaian besaran belanja wajib (mandatory spending)

Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah Daerah Provinsi Riau melakukan pengurangan secara selektif per kegiatan melalui persetujuan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD seperti belanja hibah, belanja modal, barang/jasa yang tidak prioritas seperti perjalanan dinas, penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau kegiatan sejenis lainnya yang dapat ditunda pelaksanaannya sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (covid-19)* di lingkungan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu perlu adanya rasionalisasi anggaran dikarenakan kondisi keuangan pemerintah daerah Provinsi Riau yang berkurang sehingga terjadi pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan dan perbaikan terhadap perubahan nomenklatur.

RENJA perubahan mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena RENJA perubahan menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan dinas, RENJA perubahan "menjembatani" sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur.

Selanjutnya perubahan pada renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau tahun 2020 ini dapat dijadikan acuan perubahan pada perubahan RKPD kabupaten dan tetap sejalan dengan sasaran RPJMD serta menjadi



dasar penyusunan RAPBD 2020 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja Perubahan-SKPD) merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk 1 (satu) tahun kedepan sebagai implementasi dari Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau. Eksistensi Renja adalah acuan SKPD dalam memasukkan program kerja yang berlaku selama satu tahun anggaran. Renja juga berfungsi sebagai salah satu instrument evaluasi pelaksanaan program SKPD atau instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan telah dilaksanakan.

Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra SKPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Sebagai sebuah dokumen resmi SKPD, Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Rencana Kerja Perubahan Pembangunan Daerah (RKPPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja Perubahan SKPD disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja Perubahan SKPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja



Anggaran (RKA) Perubahan Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Provinsi dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan keterkaitan atau kesesuaian dengan Renja K/L untuk melihat program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD.

Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Daerah telah memberikan tuntunan bagaimana menyusun renja SKPD. Ketentuan tersebut antara lain adalah, (1) Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berjalan; (2) program dan kegiatan dalam Renja Perubahan SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang; (3) program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*), indikator kinerja keluaran (*output*) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Dokumen Renja Perubahan SKPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan SKPD. Kualitas dokumen Perubahan Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja Perubahan SKPD sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD. Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan



evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan Renja Perubahan SKPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja SKPD. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD Perubahan dan Renja Perubahan SKPD, orientasi mengenai RKPD Perubahan dan Renja Perubahan SKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi.

Penyusunan rancangan Perubahan Renja SKPD merupakan tahapan yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Perubahan SKPD yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perubahan SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan perubahan RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Perubahan SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan perubahan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja perubahan SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja Perubahan SKPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala SKPD menetapkan Renja Perubahan SKPD untuk menjadi pedoman di lingkungan SKPD dalam menyusun program dan kegiatan perubahan prioritas SKPD pada tahun anggaran berkenaan.



1.2 LANDASAN HUKUM

Rencana Kinerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2020 disusun dengan memperhatikan dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korrupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Rencana Kinerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2015;



9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah



17. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Riau;
19. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Riau;
20. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Riau Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau;
22. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024;
23. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau;
24. Peraturan Gubernur Riau Nomor 80 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau



25. Peraturan Gubernur Riau Nomor 42 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2019-2024.
26. Peraturan Gubernur Riau Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 58 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020
27. Peraturan Gubernur Riau Nomor 59 Tahun 2020 tentang Penetapan Perubahan RKPD Provinsi Riau Tahun 2020 Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 58 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020
28. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

1. Maksud penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Penanaman Modal Dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2020 adalah untuk dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan perubahan tahun 2020 di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau yang berpedoman pada RKPD perubahan Provinsi Riau, Sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program /kegiatan tahun 2020, dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu



Satu Pintu Provinsi Riau tahun 2020. Sebagai bahan masukan program/kegiatan perubahan yang ada ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan Tahun 2020.

B. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Penanaman Modal Dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2020 adalah untuk :

1. Membentuk kesepakatan bersama di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau mengenai kinerja yang ditargetkan untuk dicapai pada Tahun 2020.
2. Sebagai acuan dalam evaluasi kinerja dan dasar dalam pengukuran capaian kinerja Tahun 2020.
3. Sebagai acuan dalam penyusunan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2020

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyajian Rencana Kinerja Perubahan Dinas Penanaman Modal Dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2020 dibagi dalam beberapa bab dan lampiran. Uraian singkat masing-masing bab adalah sebagai berikut:



Bab I ***Pendahuluan***

Memuat latar belakang, maksud, tujuan dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah;

Bab II ***Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Sampai Dengan Triwulan II***

Memuat uraian tentang Kompilasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2020 sampai dengan triwulan II Tahun 2020

Bab III ***Rencana Program Dan Kegiatan Dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah***

Memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternative, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja tidak langsung, belanja langsung dan pengeluaran pembiayaan.

Bab IV ***Penutup***

Memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2020

Tahun 2020 anggaran yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau sebesar Rp. 2.592.037.620,00 yang terdiri dari 4 program dan 18 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut realisasi penyerapan anggaran sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp. 1.463.696.095,00 atau sebesar 56.47% dari target selama 1 tahun anggaran. Hal ini terjadi karena banyak kegiatan yang dijadwalkan pada triwulan III dan ke IV. Pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II sudah terlaksana sesuai dengan jadwal yang direncanakan.

Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terdiri dari 8 kegiatan dengan realisasi sebesar Rp 912.736.948,00 dan capaian kinerja sebesar 64.06%, Kegiatan pada program ini merupakan kegiatan rutin sebagai penunjang pencapaian kinerja pelayanan.



- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari 2 kegiatan, dengan realisasi sebesar Rp 131.602.725,00 dan capaian kinerja sebesar 40,49%.
- c. Program Peningkatan Investasi terdiri dari 4 dengan realisasi sebesar Rp 63.057.422,00 dan capaian kinerja sebesar 28.94 %
- e. Program Penyelenggaraan Perizinan terdiri dari 4 kegiatan, realisasi sebesar Rp 358.249.000,00 dan capaian kinerja sebesar 57.38 %.

Adapun realisasi kinerja masing-masing kegiatan dicapai melalui program dan kegiatan yang uraiannya dapat dilihat dalam Format I.H sebagai berikut :



Evaluasi Hasil Renja Triwulan II

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Periode Pelaksanaan Tahun 2020

No	Kode					Urusan/Bidang/ Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra pada Tahun 2019 s/d 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Yang Di Evaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket					
														I	II													
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=10/7x100 %		12 = 6+10		13 = 12/5x100		14	15	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
						URUSAN WAJIB																						
						NON PELAYANAN DASAR																						
						Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-																					
1	12	01	01	001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Output: Jumlah Surat dan Paket yang dikirim, Outcome : Terpenuhinya Jasa Layanan Surat Menyurat	1000	Surat	90.000.000,00	200	10.681.998	200	15.000.000	50	1.365.000	50	1.800.000	100,00	3.165.000	50,00	21,10	300	13.846.998,00	30,00	15,39	DPMPT SP Provinsi Riau	
2	12	01	01	002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Output: Jumlah Jasa Komunikasi Air, Listrik yang disediakan, Outcome: Terlaksananya Operasional Kantor dan Komunikasi	60	Rekening	248.600.000,00	12	50.466.334	12	24.600.000	0	12.624.706	0	11.945.692	0,00	24.570.398	0,00	99,88	12	75.036.732,00	20,00	30,18	DPMPT SP Provinsi Riau	



						Informasi																				
3	1 2	0 1	0 1	00 3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Output: Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan, Outcome: Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	408 Unit	2.399.000.000,00	0	0	38	266.000.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	DPMPT SP Provinsi Riau	
4	1 2	0 1	0 1	00 7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Output: Jumlah item alat tulis kantor yang tersedia, Outcome: Presentasi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran DPMPTSP Provinsi Riau	291 Jenis	1.873.000.000,00	47	198.827.970	57	313.000.000	0	0	57	190.550.000	57,00	190.550.000	100,00	60,88	10 4	389.377.970,00	35,74	20,79	DPMPT SP Provinsi Riau	
5				00 8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Output: Jumlah Jenis Barang yang dicetak atau digandakan, Outcome: Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan pengadaan	285 Jenis	1.350.000.000,00	14	179.185.000	45	242.300.000	0	0	43	193.300.000	43,00	193.300.000	95,56	79,78	57	372.485.000,00	20,00	27,59	DPMPT SP Provinsi Riau	
6				01 0	Penyediaan Makan dan Minuman	Output: Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan, Outcome: Terpenuhinya Kebutuhan Konsumsi Keperluan Kantor	8955 Porsi 0	1.250.000.000,00	16380	160.990.000	13620	225.000.000	1.000	38.832.000	200	8.175.000	1.200	47.007.000	8,81	20,89	17.5 80	207.997.000,00	19,63	16,64	DPMPT SP Provinsi Riau	

7					01 1	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Output: Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam rangka pelaksanaan tugas, Outcome: Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan tugas	610	Kali	358.049.723.996,00	75	481.211.936	101	542.205.420	40	218.577.050	20	5.167.500	60,00	223.744.550	59,41	41,27	13 5	704.956.486,00	22,13	0,20	DPMPT SP Provins i Riau		
8					01 2	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	Output: Jumlah Tenaga Administrasi Kantor ysng disediakan, Outcome: Tersedianya Jasa Tenaga Administrasi Pelayanan DPMPTSP Provinsi Riau	185	Orang	3.330.798.184,00	27	421.760.000	26	628.080.000	12	99.120.000	0	131.280.000	12,00	230.400.000	46,15	36,68	39	652.160.000,00	21,08	19,58	DPMPT SP Provins i Riau		
9					03 4	Penyediaan Jasa Sosialisasi, Informasi, Publikasi dan Kehumasan SKPD	Output: Tersedianya Sosialisasi, Informasi, Publikasi, dan Kehumasan DPMPTSP Selama 1 Tahun, Outcome: Terwujudnya Pelayanan Informasi DPMPTSP Provinsi Riau	60	Bulan	245.000.000,00	2	1.815.000	12	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	2	1.815.000,00	3,33	0,74	DPMPT SP Provins i Riau		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					39,99	40,05			19,10	14,57			
Predikat Kinerja																					Sanga t Rend ah	Rend ah			Sanga t Rend ah	Sanga t Rend ah			
	0 2	1 2	0 1	02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur																								

10	12	01	02	005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Output: Jumlah Kendaraan, Outcome: Tersedianya Kendaraan Operasional antar jemput perizinan dan nonperizinan	2	Unit	137.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	DPMPT SP Provinsi Riau		
11				014	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Output: Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara, Outcome: Terwujudnya KelancaranTugas	71	Unit	109.226.602.864,00	12	178.684.000	13	225.000.000	4	51.375.850	3	36.326.875	7,00	87.702.725	53,85	38,98	19	266.386.725,00	26,76	0,24	DPMPT SP Provinsi Riau
12				016	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Output: Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara, Outcome: Beroperasinya Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor dengan Baik	233	Unit	470.970.000,00	5	75.822.700	210	100.000.000	70	25.000.000	60	18.900.000	130,00	43.900.000	61,90	43,90	135	119.722.700,00	57,94	25,42	DPMPT SP Provinsi Riau
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		38,58	27,63			28,23	8,55			
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
					URUSAN PENANAMAN MODAL																					
				03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-																				
13	12	01	03	001	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Output: Jumlah Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya yang diadakan, Outcome: Tersedianya Pakaian dinas beserta kelengkapannya	670	Stell	530.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	DPMPT SP Provinsi Riau		



14			04	003	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Output: Jumlah Pakaian Khusus hari-hari tertentu yang diadakan, Outcome: Tersedianya Pakaian Khusus hari-hari tertentu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau	670	Stell	419.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	DPMPT SP Provinsi Riau	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			0,00	0,00			0,00	0,00		
Predikat Kinerja																			Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
					Program Peningkatan Investasi																					
15	12	01	15	001	Peningkatan Sistem Informasi Penanaman Modal	Output: Jumlah Aplikasi, Outcome: Aplikasi yang dapat dimanfaatkan Aparatur maupun investor (Masyarakat)	15	Aplikasi	412.498.000,00	3	230.292.024	2	83.028.000	1	11.760.000	1	16.520.000	2,00	28.280.000	100,00	34,06	5	258.572.024,00	33,33	62,68	DPMPT SP Provinsi Riau
16				002	Bimbingan dan Penyuluhan Pelaksanaan Penanaman Modal	Output: Jumlah Peserta, Outcome: Jumlah Perusahaan PMA/PMDN dan Aparatur Penanaman Modal yang Memahami Ketentuan Pelaksanaan Penanaman Modal	1130	Orang	386.698.000,00	150	202.697.200	150	59.698.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	150	202.697.200,00	13,27	52,42	DPMPT SP Provinsi Riau

17			003	Promosi Luar Negeri	Output: Jumlah Even, Outcome: Tersebar luasnya informasi tentang segala potensi, sumber daya, peluang bisnis dan Investasi	12	Lokasi	363.540.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	DPMPT SP Provinsi Riau
18			004	Promosi Dalam Negeri	Output: Jumlah Promosi dalam negeri dalam rangka penyebarluasan informasi potensi, sumber daya, Peluang bisnis dan investasi melalui pameran/seminar /forum didalam negeri, Outcome: Tersebarluasnya informasi tentang segala potensi, sumber daya, peluang bisnis dan investasi melalui Promosi Dalam Negeri	18	Event	1.017.044.000,00	1	292.143.600	1	150.000.000	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	1	292.143.600,00	5,56	28,72	DPMPT SP Provinsi Riau
19			005	Riau Expo	Output: Jumlah Pengunjung penyelenggaraan pelaksanaan pameran pembangunan Riau Expo yang dapat menambah nilai investasi di Provinsi, Outcome: Tersebarluasnya informasi tentang segala potensi, sumber daya, peluang bisnis dan investasi melalui kegiatan pameran pembangunan Riau Expo	450000	Pengunjung	903.108.000,00	75000	175.146.000	80000	155.648.000	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	75.000	175.146.000,00	16,67	19,39	DPMPT SP Provinsi Riau

20				006	Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal	Output: Jumlah Orang, Outcome: Terwujudnya sinkronisasi dibidang Penanaman Modal dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan daerah	625	Orang	432.970.000,00	1	179.773.250	60	80.970.000	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	1	179.773.250,00	0,16	41,52	DPMPT SP Provinsi Riau	
21				007	Pelaksanaan Warta Promosi Daerah	Frekuensi terbit dan jumlah Eksemplar yang diterbitkan	8	Edisi	327.000.000	2	182.597.300	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	2	182.597.300,00	25	55,84	DPMPT SP Provinsi Riau	
22				008	Penyediaan Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal	Output: Jumlah Sarana dan Prasarana Promosi, Outcome: Tersedianya Sarana dan Prasarana Promosi Potensi Daerah, Peluang Investasi dan Daya Tarik Wisata Daerah	32	Unit	6.635.000.000,00	6	115.200.000	2	100.000.000	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	6	115.200.000,00	18,75	1,74	DPMPT SP Provinsi Riau	
23				009	Sinkronisasi dan pemuktahiran data investasi PMA/PMDN	Output: Jumlah Dokumen Proyek Investasi PMDN/PMA, Outcome: Data Investasi PMDN/PMA se Provinsi Riau	4	Dokumen	279.900.000,00	1	116.797.900	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	1	116.797.900,00	25	41,73	DPMPT SP Provinsi Riau	
24				010	Pelaksanaan Kemitraan UMKM dengan Perusahaan PMA/PMDN	Output: Jumlah Peserta yang mengikuti Pelaksanaan Kemitraan UMKM dengan Perusahaan PMA/PMDN, Outcome: Terjalinya Kemitraan UMKM dengan	395	Peserta	690.032.000,00	24	85.021.600	75	105.282.000	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	24	85.021.600,00	6,08	12,32	DPMPT SP Provinsi Riau	

30				019	Penyusunan Buku Statistik Investasi Daerah	Output: Jumlah Buku Statistik Investasi Provinsi Riau, Outcome: Tersedianya informasi perkembangan realisasi investasi PMA/PMDN yang akurat sebagai acuan pengambilan keputusan	1175	Buku	315.000.000,00	0	0	225	50.000.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	DPMPT SP Provinsi Riau
31				020	Penyusunan Data Kemitraan antara UMKM dengan PMA/PMDN	Jumlah Laporan UMKM yang Berpotensi untuk dimitrakan dengan PMA/PMDN	4	Laporan	395.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	DPMPT SP Provinsi Riau
32				021	Penyusunan Dokumen Invesment Project Ready yo Over (IPRO)	Output: Jumlah Dokumen IPRO, Outcome: Tersedianya Dokumen IPRO	8	Dokumen	85.099.235.545,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	DPMPT SP Provinsi Riau
33				023	Forum Komunikasi Peningkatan Iklim Investasi	Output: Jumlah Laporan Iklim Investasi, Outcome: Tersedianya Laporan Investasi	4	Laporan	675.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	DPMPT SP Provinsi Riau
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			9,72	3,06	8,90			17,87		
Predikat Kinerja																			Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah		
					Program Penyelenggaraan Perizinan																					
34	12	01	16	001	Forum Teknis Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	Output: Tersedianya Wadah Koordinasi Teknis Dalam Penyelenggaraan Pelayanan, Outcome: Terlaksananya Forum Koordinasi	4	Laporan	57.001.077.805	0	106.150.400	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	106.150.400,00	0	0,19	DPMPT SP Provinsi Riau

38				006	Konsolidasi Penanganan Pengaduan Kab/Kota Se Provinsi Riau	Output: Jumlah Peserta Aparatur/ Masyarakat, Outcome: Terwujudnya Konsolidasi Penanganan Pengaduan Perizinan dan Nonperizinan Kabupaten/Kota se Provinsi Riau	680 Orang	445.000.000	85	147.816.800	100	120.000.000	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	85	147.816.800,00	12,5	33,22	DPMPT SP Provinsi Riau		
39				006	Monitoring dan Evaluasi Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Perizinan dan Nonperizinan yang telah diterbitkan	5 Laporan	291.834.000	1	56.864.600	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	1	56.864.600,00	20	19,49	DPMPT SP Provinsi Riau		
40				007	Peningkatan Kinerja Tim Survey Perizinan dan Nonperizinan	Output: Jumlah BAP, Outcome: Penerbitan Izin dan Nonperizinan sesuai dengan mekanisme survey	1170 BAP	2.769.920.000	120	738.833.400	120	584.920.000	72	157.440.000	45	89.745.000	117,00	247.185.000	97,50	42,26	237	986.018.400,00	20,2564	35,60	DPMPT SP Provinsi Riau	
41				008	Peningkatan Kinerja Satuan Tugas Percepatan Berusaha Provinsi Riau	Ouput: Jumlah Penanganan Permasalahan Investasi, Outcome: Jumlah Proyek Investasi yang terealisasi PMA/PMDN (Proyek dihitung berdasar izin usaha) Angka Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan (Nilai Interval IKM)	15 Kasus	470.000.000	15	120.023.944	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	15	120.023.944,00	100	25,54	DPMPT SP Provinsi Riau		

42				010	Penyuluhan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	Output: Jumlah Peserta, Outcome: Tersedianya Laporan Penyuluhan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Seprovinsi Riau	700	Orang	969.898.000	70	224.494.600	100	169.898.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	70	224.494.600,00	10	23,15	DPMPT SP Provinsi Riau	
43				011	Rapat Koodinasi PTSP	Output: Tersedianya wadah koordinasi DPMPTSP Se Provinsi Riau dan Rapat Teknis dalam Penyelenggaraan Pelayanan perizinan dan nonperizinan	10	Laporan	732.630.200	0	0	2	167.630.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	DPMPT SP Provinsi Riau	
44				012	Peningkatan Sistem Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah Aplikasi/sistem informasi manajemen pelayanan perizinan dan nonperizinan	12	Sistem Informasi	143.376.450.273	3	230.292.024	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	3	230.292.024,00	25	0,16	DPMPT SP Provinsi Riau	
45				013	Penyusunan Inovasi Perizinan dan Nonperizinan	Output:Jumlah Inovasi yang mendapatkan Pengakuan Nasional, Outcome: Tersedianya Inovasi yang mendapatkan pengakuan nasional	4	Inovasi	275.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	DPMPT SP Provinsi Riau	
46				014	Penyusunan Dokumen Ketatalaksanaan PTSP	Output: Jumlah Dokumen Ketatalaksanaan PTSP, Outcome: Tersedianya dokumen ketatalaksanaan PTSP	4	Dokumen	445.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	DPMP TSP Provinsi Riau	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					13,91	6,39		20,85	20,78		

Predikat Kinerja			Sangat Rendah	Sangat Rendah		Sangat Rendah	Sangat Rendah		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM ...)			70,21	45,09		61,81	50,11		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM ...)			Sangat Rendah	Sangat Rendah		Sangat Rendah	Sangat Rendah		
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :									
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :									
Tindak Lanjut Yang Di Perlukan Dalam Triwulan Berikutnya :									
Tindak Lanjut Yang Di Perlukan Dalam Renja PD Berikutnya :									



BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA DINAS PTSP PROVINSI RIAU TAHUN 2020

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau melakukan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2020 karena menindaklanjuti keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri keuangan nomor 119/2813/SJ dan nomor 177/KMK.07/2020 tentang percepatan penyesuaian anggaran Pendapatan dan belanja daerah Tahun 2020 dalam rangka penanganan corona virus 2019 (COVID 19) Serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional. Berkenaan dengan hal itu dilakukan penyesuaian target pendapatan daerah dan merasionalisasi belanja daerah, anggaran atau rasionalisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan yang bersifat skala prioritas dan juga bentuk dukungan terhadap program kegiatan dari Pemerintah Daerah yang mendesak akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (covid-19)* yang telah berdampak terhadap perlambatan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan. Hal tersebut akan berdampak terhadap penerimaan Daerah Provinsi Riau melalui dana tranfer seperti DAU, DAK, DBH dan DID yang akan dilakukan penyesuaian besaran belanja wajib (mandatory spending) serta adanya perubahan nomenklatur dan adanya pergeseran anggaran baik penambahan maupun pengurangan serta kegiatan yang mengalami penghapusan kegiatan.



Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah Daerah Provinsi Riau melakukan pengurangan secara selektif per kegiatan seperti belanja hibah, belanja modal, barang/jasa yang tidak prioritas seperti perjalanan dinas, penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau kegiatan sejenis lainnya yang dapat ditunda pelaksanaannya sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (covid-19)* di lingkungan Pemerintah Daerah

Adapun program dan kegiatan Dinas PTSP Provinsi Riau Tahun 2020 dengan program utama (Urusan) sebanyak 2 program dengan 8 kegiatan dan 2 program pendukung (Non Urusan) dengan 10 kegiatan dengan anggaran berdasarkan DPA Murni sebesar Rp. 5.592.037.620,00,- namun dalam perkembangannya pagu anggaran Dinas PTSP Tahun 2020 telah mengalami pergeseran. Pagu Anggaran Dinas PTSP hasil pergeseran ke IV menjadi 2.592.037.620,00. Sedangkan untuk Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) Dinas PTSP Tahun 2020 menjadi sebesar Rp 2.783.495.820.00,- terjadi penambahan anggaran sebesar Rp. 2.808.541.800.00,-

Jumlah kegiatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2020 sebanyak 28 kegiatan dan 4 program, setelah perubahan menjadi 4 program dan 18 kegiatan, kegiatan mengalami perubahan sebanyak 15 kegiatan, kegiatan yang tidak mengalami perubahan sebanyak 3 kegiatan sehingga jumlah seluruh kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2020 sebanyak 18 kegiatan Dengan rincian sebagai berikut :



A. Kegiatan yang mengalami perubahan :

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi ,sumber daya air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
6. Penyediaan Makanan dan Minuman
7. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah

Program Peningkatan Investasi

8. Peningkatan Sistem Informasi Penanaman Modal
9. Pengendalian Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Provinsi Riau
10. Pengembangan Promosi
11. Pengadaan Buku Statistik Investasi Daerah

Program Penyelenggaraan Perizinan

12. Peningkatan Sistem Informasi/Publikasi tentang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Provinsi
13. Penerapan dan Pengendalian Manajemen Mutu Pelayanan
14. Publikasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
15. Peningkatan Kinerja Tim Survey Perizinan dan NonPerizinan

B. Kegiatan yang tidak mengalami pergeseran/perubahan :

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Administrasi Kantor.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

C. Kegiatan yang dihilangkan

Program Peningkatan Investasi

1. Bimbingan dan Penyuluhan Pelaksanaan Penanaman Modal



2. Promosi Dalam Negeri
3. Riau Expo
4. Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal
5. Penyediaan Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal
6. Pelaksanaan UMKM dengan perusahaan PMA/PMDN
7. Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi Riau

Program Penyelenggaraan Perizinan

8. Konsolidasi Penanganan Pengaduan Kab./kota se-Provinsi Riau
9. Penyuluhan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
10. Rapat Koordinasi PTSP



BAB IV

PENUTUP

Demikian Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2020 ini dibuat untuk menjadi pedoman di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dalam menyusun program dan kegiatan perubahan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020. Melalui dokumen Rencana Kerja Perubahan Tahun 2020 ini, diharapkan untuk dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau selama satu tahun dalam mendukung pencapaian prioritas pembangunan Tahun 2020.

Nilai anggaran yang tercantum dalam Renja perubahan ini masih bersifat indikatif. Dengan demikian penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 selain mengacu pada Renja Perubahan ini juga menyesuaikan dengan jumlah anggaran yang tersedia.

Pekanbaru, Agustus 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

Drs.H.HELMI.D,M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 196612311997031027



	RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH							Formulir RKPA - SKPD 2.2	
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2020								
Urusan Pemerintahan : 1.02.18. - KEARSIPAN									
Organisasi : 1.02.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU									
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah									
Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (Kuantitatif)	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (berkurang)		
Program	Kegiatan				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6	9	
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			2.256.185.420,00	1.472.590.120,00			
	001.	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Pekanbaru	200 surat	15.000.000,00	10.998.000,00	(4.002.000,00)	(26,68)	
	002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pekanbaru	12 rekening	24.600.000,00	32.400.000,00	7.800.000,00	31,71	
	003.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pekanbaru	38 unit	266.000.000,00	13.500.000,00	(252.500.000,00)	(94,92)	
	007.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pekanbaru	45 jenis	313.000.000,00	190.930.000,00	(122.070.000,00)	(39,00)	
	008.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pekanbaru	45 jenis	242.300.000,00	193.840.000,00	(48.460.000,00)	(20,00)	
	010.	Penyediaan Makan dan Minuman	Kota Pekanbaru	13.620 Porsi	225.000.000,00	75.744.000,00	(149.256.000,00)	(66,34)	
	011.	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Provinsi Riau	101 kali	542.205.420,00	327.098.120,00	(215.107.300,00)	(39,67)	
	012.	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	Pekanbaru	26 orang	628.080.000,00	628.080.000,00	0,00	0,00	
02.		Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur			325.000.000,00	325.000.000,00			
	014.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pekanbaru	13 unit	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	0,00	
	016.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pekanbaru	210 unit	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
(1.02.12.) - PENANAMAN MODAL									
15.		Program Peningkatan Investasi			1.214.249.000,00	217.917.500,00			
	001.	Peningkatan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pekanbaru	2 Aplikasi	83.028.000,00	73.920.000,00	(9.108.000,00)	(10,97)	
	002.	Bimbingan dan Penyuluhan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pekanbaru	150 orang	59.698.000,00	0,00	(59.698.000,00)	(100,00)	
	004.	Promosi Dalam Negeri	Provinsi Riau	1 even	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	
	005.	Riau Expo	Pekanabru	80.000 pengunjung	155.648.000,00	0,00	(155.648.000,00)	(100,00)	
	006.	Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal	Provinsi Riau	60 orang	80.970.000,00	0,00	(80.970.000,00)	(100,00)	

